

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu elemen terpenting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, tumbuh kembang manusia akan sesuai dengan perlakuan pendidikannya dari sejak dini. Dengan kata lain pendidikan akan menjadi sebuah ujung tombak pengelolaan sumber daya manusia, inilah yang dibutuhkan sebuah negara yang ingin memiliki berbagai aspek kemajuan di segala bidang tentunya harus diawali dengan menejemen pendidikan yang baik.

Bila melihat misi pendidikan nasional negara Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia yang dijelaskan dalam UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 pasal 3 bahwa : “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk wadah serta peradaban manusia yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, bisa ditarik kesimpulan bahwa sistem pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya”. Manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mandiri dan mantap, serta rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa.

Titik fokus pendidikan Indonesia terletak pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan, perluasan kesempatan belajar, relevansi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya (Departemen Pendidikan Nasional, 1997). Dari uraian tersebut dapat dirangkum bahwasannya cita-cita mulia dari pendidikan

Nusan Mauli Pranata, 2014

Pemetaan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas di kota Cimahi melalui Sistem Informasi Geografis

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ditopang oleh berbagai aspek sikap yang menjadi standarisasi perilaku manusia yang beradab, ini semua dibentuk dengan berbagai prosesnya dalam suatu wadah yang dinamakan pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional bisa diibaratkan adalah sebuah landasan kebijakan makro dalam bidang pendidikan, dan implementasinya saat ini didukung oleh adanya otonomi daerah yang secara nyata tergambar oleh desentralisasi pendidikan yang diibaratkan adalah sebuah kebijakan mikro. Desentralisasi pendidikan memiliki arti sebuah kebijakan yang diberikan oleh pusat kepada daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola bidang pendidikan daerahnya sendiri, ada beberapa hal menjadi titik fokus desentralisasi pendidikan yaitu meningkatkan partisipasi pelaksana pendidikan, mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya pendidikan untuk memberdayakan masyarakat, serta lebih cepat dalam pengambilan keputusan.

Seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang sistem pendidikan nasional dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, jalur pendidikan yang telah ditetapkan ada dua jalur yaitu jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal, secara sederhana pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, sedangkan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, maka dari itu sekolah termasuk sebagai subsistem dalam pendidikan nasional.

Sekolah adalah lembaga yang menyelenggarakan kebijakan pendidikan nasional yang diturunkan menjadi kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Dari beberapa hal yang dapat dicapai dengan desentralisasi pendidikan ternyata ada beberapa permasalahan yang bersumber dari tahap perencanaan yang bisa dibilang buruk, salah satu contohnya terjadi di Jawa Barat, berdasarkan hasil laporan tim pemetaan dan inventarisasi persekolahan di Jawa Barat Tahun 2008/2009

Nusan Mauli Pranata, 2014

Pemetaan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas di kota Cimahi melalui Sistem Informasi Geografis

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(Departemen Pendidikan Nasional, 2009), memberikan indikasi yang kurang memuaskan hal ini dikarenakan sebagian besar dari fasilitas bangunan fisik sekolah yang dibangun oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tidak bertahan lama dan mengalami kekurangan siswa. Dalam membangun fasilitas pendidikan khususnya mendirikan gedung sekolah baru harus memperhatikan lingkungan sekitar seperti memperhatikan populasi siswa, kondisi fisik tanah, jauh dari gangguan lingkungan dan gangguan bencana alam. Sehingga lokasi yang akan dibangun gedung sekolah baru nantinya tidak akan kekurangan siswa dan tidak merugikan sekolah lainnya (Departemen Pendidikan Nasional, 1997). Contoh nyata adanya sebuah permasalahan dalam manajemen dan pengelolaan pendidikan terjadi di Kota Cimahi.

Tata Wikanta DISDIKPORa dalam cimahikota.blogspot.com 2011, mengatakan :

“Berbicara mengenai sekolah dan jumlah muridnya, diserahkan kembali pada masyarakat, Karena mereka yang menilai kualitas sekolah yang dipilih, kita berbicara mutu pendidikan, kalau ada kekurangan murid di sekolah swasta bukan berarti ada pengelembungan siswa di SMA negeri, karena saat ini banyak masyarakat yang memilih bersekolah di SMK. Untuk itu kami akan melakukan pengecekan kembali dan evaluasi mengenai jumlah murid di sekolah menengah swasta dan di sekolah menengah negeri”.

Dari Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Cimahi. Permasalahan ini cenderung bersifat menyangkut keseluruhan SMA yang ada di Kota Cimahi dimana sirkulasi data arus siswa yang menjadi peserta didik Sekolah Menengah Atas tidak dapat terkontrol dengan baik, di sisi lain sekolah-sekolah baru berdiri tanpa memperhatikan kebutuhan fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Atas yang sebenarnya, ini telah menjelaskan adanya sebuah kurang efektifnya pengelolaan lembaga pendidikan jenjang SMA di Kota Cimahi.

Nusan Mauli Pranata, 2014

Pemetaan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas di kota Cimahi melalui Sistem Informasi Geografis

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dari data Dinas Pendidikan Kota Cimahi hingga tahun 2013 ini, di Kota Cimahi telah berdiri 16 Sekolah Menengah Atas yang terdiri dari 6 Sekolah Menengah Atas Negeri, 10 Sekolah Menengah Atas Swasta. Jumlah sekolah yang mencapai 16 yang berdiri di tiga kecamatan yang ada di Kota Cimahi ini membutuhkan sumber peserta didik yang dominan berasal dari penduduk lokal Kota Cimahi. Pemerintah atau dalam hal ini Dinas Pendidikan harus tetap mempunyai kontrol terhadap pengelolaan sekolah-sekolah yang telah berdiri, ini untuk menjaga keseluruhan sekolah tersebut agar terus mampu menyelenggarakan pendidikan formal.

Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dapat dimanfaatkan dunia pendidikan, dalam hal perencanaan, pengelolaan dan evaluasi, seharusnya para pengelola pendidikan mulai memanfaatkan hal ini karena efisiensi waktu, biaya serta keakuratan informasi merupakan kelebihan yang akan didapatkan dengan menggunakan SIG di bidang pendidikan nantinya. Saat ini dapat kita ketahui bahwa peran SIG dalam pendidikan terbagi kedalam beberapa bagian (Prayoga 2009:8) diantaranya :

1. Pemerataan akses pendidikan dan pemetaan lokasi sekolah
2. Perencanaan pendidikan yang diselaraskan atau sejalan dengan potensi dan pengembangan wilayah
3. Kegiatan evaluasi dan monitoring pendidikan
4. Pendukung pelaksanaan kegiatan otonomi pendidikan
5. Pendukung pelaksanaan UU. No 20 Tahun 2003 (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional).

Dari peran SIG diatas salah satunya akan coba diimplementasikan dalam permasalahan yang terjadi di Kota Cimahi, yang bisa didefinisikan sebagai permasalahan keruangan, mengingat ini akan berfokus kepada lokasi, jarak serta persebaran. SIG bisa dijadikan pilihan utama dalam mengidentifikasi, memvisualisasikan hingga memberikan alternatif pilihan menjawab permasalahan keruangan, ini didukung oleh kemampuan SIG yang mampu mengintegrasikan data spasial dan data atributnya sesuai dengan kebutuhan analisisnya, maka dari

Nusan Mauli Pranata, 2014

Pemetaan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas di kota Cimahi melalui Sistem Informasi Geografis

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

itu pemanfaatan SIG dalam dunia pendidikan khususnya pengelolaan oleh para pembuat kebijakan perlu menjadi sebuah hal yang wajib dilengkapi dan dipelajari, dan dari sanalah teretus sebuah ide penelitian yang berjudul “PEMETAAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA CIMAHU MELALUI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS” yang diharapkan mampu membantu dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan masalah yang disusun dalam bentuk beberapa pertanyaan, diantaranya :

1. Bagaimana sebaran lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Cimahi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis ?
2. Bagaimana sebaran kondisi lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Cimahi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis ?
3. Bagaimana jangkauan area pelayanan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Cimahi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis ?

C. Tujuan Penelitian

Secara sederhana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah, diantaranya :

1. Untuk mengetahui sebaran lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Cimahi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis ?
2. Untuk mengetahui sebaran kondisi lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Cimahi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis ?

3. Untuk mengetahui jangkauan area pelayanan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Cimahi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis ?

D. Manfaat Penelitian

Secara sistematis penelitian ini dilaksanakan mulai dari tahapan latar belakang, perumusan masalah hingga tujuan penelitian yang diharapkan akan memiliki manfaat, yang diantaranya :

1. Sebagai implementasi dukungan penggunaan Sistem Informasi Geografi di Bidang Pendidikan.
2. Sebagai bahan pertimbangan saat melakukan perencanaan ataupun evaluasi dalam hal pengelolaan pendidikan bagi Dinas Pendidikan Kota Cimahi.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan bagi lembaga sekolah jenjang Sekolah Menengah Atas di Kota Cimahi.
4. Sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan dengan pengelolaan pendidikan Kota Cimahi.